

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwinata, Saleh, 1980, *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung : Alumni.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I- Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- _____, 2003, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III – Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV – Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum, cet.2*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualism Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengeketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan.
- HS, Salim, 2008, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, J, 2012, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Kartasapoetra, G, R.G Kartasapoetra, A.G Kartasapoetra, dan A. Setiady, 1991, *Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendagunaan Tanah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, Yasmin, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nugraha, Safri, *et.al.*, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Parlindungan, A.P, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
- _____, 2017, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana.
- Sarjita, 2005, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Edisi Kedua*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka.
- Satrio, J, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- Soedjendro, J. Kartini, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerodjo, Irwan, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkota.
- Soetantio, Retnowulan, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Soimin, Soedharyo, 2008, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta : Sinar Graifika.

Suharsimi, Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sumarjono, Maria S.W., 2012, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Agraria*, Yogyakarta: Andi Offset.

Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Palu: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian, 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Tesis

Finish, Geovani Ajeng, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, Tesis, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2017.

Henny, “Upaya Kantor Pertanahan Dalam Menanggulangi Sertipikat Ganda di Kabupaten Kubu Raya Pontianak”, Tesis, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.

Setyoadi, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Sertipikat Ganda di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2003.

Suciawan, Jesica, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Dari Sertipikat Ganda”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2019.

Sahnan, “Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Sinar Rowok Indah Di Kawasan Pariwisata Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat)”, Disertasi Doktor, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/PDT/2019/PT Medan.

Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdk.

D. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, Bapak Satria Saronikhamo Waruwu, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Yunita Arumsari, pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023.

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcfd06b6/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023, pukul 22.30 WIB.